

KARYA ILMIAH
GLOBALISASI DAN KEMISKINAN

DISUSUN OLEH
ADELITA LUBIS



UNIVERSITAS MEDAN AREA

2015



KARYA ILMIAH
GLOBALISASI DAN KEMISKINAN

DISUSUN OLEH

ADELITA LUBIS 5509 1114



UNIVERSITAS MEDAN AREA

2015



Daftar Isi

Daftar Isi	1
Abstract	2
Abstraksi.....	4
Pendahuluan	
1. Latar Belakang Masalah	6
2. Rumusan Masalah	11
3. Kerangka Berpikir	
3.1. Pendekatan Ekonomi Politik.....	11
3.2. Perspektif Liberal.....	13
3.3. Teori Sistem Dunia Immanuel Wallerstain.....	16
4. Hipotesis.....	19
Pembahasan	
1. Neoliberalisme Dongeng Indah Imperialisme Baru.....	20
2. TNC, WTO, IMF dan Bank Dunia.....	26
Kesimpulan dan Saran.....	35
Daftar Pustaka	40

Abstract

Globalization must be recognized it can no longer inevitable. After three decades the history of globalization, many things of globalization has changed and developed very fast. But the rapid of globalization does not make it as an absolute conclusion that globalization is a success in terms of creating benefits to many countries. Because although in the rapid development of globalization, the globalization is also proved that have a lot of negative impacts, one of the example is the economic growth and poverty.

Which becomes interesting to see here is in the early formulated the concept of globalization and neoliberal system was intended to overcome the problems of poverty and social inequality. Because free trade market that minimize the role of nation considered to be a solution for improving the national economy of a country. With the release and provide the opportunities for the foreign companies to invest their money and it considered can increase the income for the country and it also can be a chance for the country to make the cross international borders for selling their products to other country.

But, after three decades of economic liberalization system has adopted by many countries, there are many observers who saw that the neoliberal system with free market has failed to reduce the poverty and social inequality, even on the other hand the globalization and the neoliberal system make the poverty has increased and widen the gap between the develop and third world countries.

All of that things is become the background of this writing, that tries to see the true fact is neoliberalization that supported by globalization can make increase the national income of the state and reduce the poverty and who is the really actor that benefit from the globalization itself.

From that two question will be expected to become one conclusion about the relations between globalization and poverty. Whether globalization is to reduce the level of poverty that exist in accordance with the concept formulated by his predecessors or even really just an excuse to attract developing countries to apply this .

Abstraksi

Globalisasi memang tidak bisa terelakkan pada saat ini. Setelah tiga dekade sejarah perkembangan globalisasi, banyak hal yang telah berubah dan pembangunan juga berkembang dengan pesat. Tetapi perkembangan globalisasi tidak membuat kita sampai kepada kesimpulan mutlak bahwa globalisasi telah sukses di dalam meningkatkan kesejahteraan bagi negara-negara. Karena meskipun pembangunan yang terjadi cukup pesat, globalisasi juga membuktikan bahwa banyak dampak negatif yang ditimbulkan karena globalisasi, salah satu contohnya adalah pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

Yang menjadi menarik untuk dilihat disini adalah, pada awal dirumuskannya konsep globalisasi dan sistem neoliberal adalah untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Karena pasar bebas yang telah meminimalkan peranan negara dianggap dapat menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian nasional dari sebuah negara. Dengan membebaskan pasar dianggap dapat meningkatkan peluang bagi negara lain untuk menginvestasikan uang mereka dan dapat meningkatkan pemasukan bagi sebuah negara dan juga dapat menjadi peluang bagi negara untuk lintas batas internasional dalam menjual produk mereka ke negara lain.

Tetapi setelah tiga dekade sistem ekonomi liberal diadaptasi oleh banyak negara, banyak pengamat yang melihat bahwa sistem neoliberal dengan pasar bebas telah gagal untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial, bahkan di sisi lain globalisasi dan sistem neoliberal membuat kemiskinan semakin meningkat dan perbedaan sosial antara negara maju dan berkembang semakin besar.

Hal inilah yang menjadi latar belakang tulisan ini, untuk melihat bagaimana fakta sebenarnya tentang neoliberalisme yang mendukung globalisasi justru mengurangi

pendapatan negara dan bahkan menciptakan kemiskinan. Juga untuk melihat siapa saja aktor sebenarnya yang menikmati untung dari globalisasi itu sendiri.

Dari pertanyaan tersebut diharapkan dapat tercapai sebuah kesimpulan mengenai hubungan antara globalisasi dan kemiskinan.



Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Seolah-olah tanpa asal usul globalisasi muncul dan tumbuh menjadi suatu hal yang besar dan kuat yang membuat pengaruhnya sudah tidak dapat dielakkan lagi dan telah merambah hampir kesemua aspek dari kehidupan yang ada. Banyak pihak yang dikejutkan bagaimana globalisasi dapat tumbuh dan berkembang dalam waktu yang relatif singkat. Hal inilah yang kemudian menjadikan globalisasi sebagai sebuah tema besar yang sedang dihadapkan kepada semua pihak saat ini baik di tingkat internasional maupun di tingkat yang lebih nasional dan lokal. Kini setelah tiga dasawarsa perjalanan globalisasi ini kita dapat mengamati hasil yang ditimbulkannya. Sebagian hasilnya berupa kesuksesan luar biasa yang tidak pernah diperkirakan oleh umat manusia sedangkan sebagian berupa kegagalan yang menimbulkan petaka dahsyat dan membuat banyak pihak tercengang.

Bersamaan dengan maraknya pembicaraan tentang globalisasi sejak tahun 1980-an, banyak perdebatan telah dilakukan menyangkut pertanyaan tentang apakah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang sedemikian mencolok dewasa ini berhubungan langsung dengan fenomena yang sedang diperdebatkan. Akan tetapi, sejalan dengan ketiadaan definisi tunggal yang disepakati dari fenomena globalisasi, dan karena sebagai konsep kunci ilmu sosial makna sebenarnya dari istilah ini tetap diperdebatkan, para ahli juga berbeda pendapat dalam melihat sebab-sebab yang mendasari fenomena kemiskinan dan ketimpangan global, dan bagaimana fenomena ini berhubungan dengan globalisasi ekonomi.

Globalisasi di satu sisi dengan perdagangan bebasnya memang telah membawa manfaat bagi banyak negara di dunia dengan mendorong peningkatan *Gross Domestic*

Product (GDP) akan tetapi di sisi lain juga ternyata tidak jarang membuat banyak pihak dirugikan dengan aturan main yang cenderung tidak adil.¹

Hingga beberapa tahun yang lalu globalisasi yang salah satu cirinya ditandai dengan liberalisasi ekonomi masih dianggap sebagai sebuah metode yang paling baik untuk pembangunan. Para pendukung globalisasi menganggap bahwa dengan meliberalisasi ekonomi dan menyerahkan jalannya kegiatan perekonomian kepada mekanisme pasar maka akan semakin baik bagi pembangunan.²

Permasalahan-permasalahan seperti kemiskinan dan pengangguran dianggap dapat diatasi dengan membiarkan masuknya investasi perusahaan asing yang dapat menciptakan banyaknya lapangan pekerjaan. Perdagangan bebas dianggap sebagai suatu konsep ideal yang menawarkan kesempatan yang sama bagi setiap negara untuk dapat bersaing secara terbuka dan melakukan ekspansi kegiatan perekonomiannya di luar negaranya. Seakan telah menjadi harga mati, globalisasi dan neoliberal kemudian diadaptasi oleh hampir setiap negara dengan dasar pemikiran bahwa sistem ini dianggap sebagai formula terampuh yang pernah diciptakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi permasalahan sosial.

Bahkan menurut laporan World Development Report dilaporkan bahwa globalisasi dapat memicu pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi kesenjangan dan kemiskinan melalui efek ganda (*multiplier effects*) perluasan peluang kerja dan peningkatan upah riil.

Meskipun laporan dari world bank menyatakan globalisasi dapat memicu pertumbuhan ekonomi, tetapi nyatanya banyak kalangan yang kontra dengan globalisasi.

¹ Sjamsul Arifin (et.al), *IMF dan stabilitas Keuangan Internasional*, Jakarta: PT Elex Media Computindo, 2004, hal.4

² Martin khor, *Memperdagangkan Kedaulatan: Free Trade Agreement dan Nasib Bangsa*, Yogyakarta: Insist Press, 2010, hal. 44

Terdapat beberapa argumen yang mendukung bahwa globalisasi dapat menyebabkan kemiskinan. Di negara maju globalisasi menyebabkan pengangguran, penghasilan stagnan dan ketimpangan meningkat.

Skeptisme juga semakin mulai muncul terhadap pandangan globalisasi dan liberalisme. Alasan utama dari berubahnya pola pandang ini adalah liberalisasi yang sedemikian cepat menimbulkan lonjakan impor di banyak negara berkembang, dengan dampak negatif pada sektor industri dan pertanian lokal, serta neraca perdagangan dan situasi hutang. Hal ini didukung pula oleh krisis ekonomi global yang menimpa negara-negara di dunia yang jangankan membawa peningkatan perekonomian nasional malah semakin membuat perekonomian nasional terpuruk.³

Kini, gagasan tentang globalisasi itu sendiri mulai menguap ke udara bebas. Banyak yang telah lenyap. Sebagiannya barangkali akan tetap bertahan. Kini alam dunia dipenuhi dengan gagasan, ideologi dan pengaruh lain yang saling beradu. Tokoh-tokoh terkemuka yang pernah mengatakan bahwa negara-bangsa harus tunduk pada kekuatan ekonomi kini mengatakan bahwa negara-bangsa tersebut perlu diperkuat untuk menghadapi kekacauan militer global. Para penganjur globalisasi yang mengatakan "privatisasi, privatisasi, privatisasi" kini menyadari bahwa mereka keliru, karena aturan hukum nasional lebih penting.⁴

Globalisasi dianggap gagal dari perencanaan dan gambaran awal pada saat dirumuskan terdahulu. Liberalisasi ekonomi yang dahulu dianggap dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran dengan cara membebaskan pasar ternyata malah menjadikan suatu peluang bagi perusahaan-perusahaan

³ Sjamsul Arifin (et.al), *op.cit.*, hal.4

⁴ John Ralston Saul, *Runtuhnya Globalisme dan Penemuan Kembali Dunia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal.4



asing untuk memperkerjakan ribuan orang dengan upah di bawah standar minimum dan melakukan tindakan-tindakan pengeksploitasan sumber daya alam di suatu negara. Pemerintah yang dalam literatur-literatur politik merupakan kekuasaan tertinggi di dalam pengambilan kebijakan telah kehilangan kekuatannya dengan menyesuaikan diri terhadap perusahaan-perusahaan multinasional yang ada. Perdagangan bebas yang dahulu menawarkan konsep perdagangan yang adil ternyata hanya ditujukan kepada negara-negara maju yang memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk mengambil peran sebagai pemain, sementara negara-negara berkembang hanya menjadi tempat untuk penyaluran barang-barang produksi negara maju.

Dalam dua dekade terakhir neoliberalisme telah gagal total dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran di dalam negara. Pertumbuhan ekonomi yang digembar-gemborkan oleh globalisasi dan neoliberalisme ternyata pada fakta lapangannya tidak pernah terjadi. Ha- Joon Chang dan Ilene Gabriel di dalam bukunya menulis sebagai berikut:

"... Di negara-negara industri, tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita tahunan mengalami penurunan, dari sekitar 3% selama era intervensi pada tahun 1960-an menjadi 2% selama masa era neoliberal tahun 1980-2000. Nasib negara berkembang bahkan lebih buruk lagi. Pertumbuhan pendapatan per kapita tahunan mereka rata-rata anjlok dari 3% selama tahun 1960-1980 menjadi 1,5% selama tahun 1980-2000...Hal yang paling mengganggu adalah kenyataan bahwa negara berkembang termiskin (negara yang memiliki GDP per kapita dari 375 dollar hingga 1.121 dollar) bergerak dari tingkat sedang 1,9% pertumbuhan GDP per kapita tahun selama era intervensi di tahun 1960-1980an menurun menjadi 0,5% per tahun selama

era neoliberal. Ringkasnya, kondisi ekonomi negara dengan tingkat GDP per kapita berapapun menjadi lebih buruk selama era neoliberal dibanding dua dekade sebelumnya”.⁵

Dari data yang disajikan di atas jelas sekali terlihat bahwa sangat mustahil sekali kita dapat sampai kepada satu kesimpulan bahwa neoliberalisme mendorong pertumbuhan ekonomi karena berbagai fakta yang dapat kita lihat ternyata malah menunjukkan hal sebaliknya bahwa neoliberal membuat kinerja ekonomi negara berkembang kian memburuk.

Dari latar belakang inilah kemudian terlintas pertanyaan untuk merefleksikan kembali apakah sebenarnya globalisasi dan liberalisasi ekonomi benar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan permasalahan kemiskinan dan kesenjangan seperti yang dicita-citakan di awal dan sebenarnya siapa aktor yang paling diuntungkan dengan terciptanya globalisasi dan sistem neoliberal ini. Tulisan ini merupakan usaha memaparkan kembali perdebatan di sekitar fenomena globalisasi di satu pihak dan kemiskinan dan ketimpangan global di pihak lain, tetapi dengan tujuan yang lebih spesifik, yaitu menafsirkan makna di balik fenomena ini sebagai keharusan menempatkan keadilan sebagai prioritas.

⁵ Ha-Joon Chang and Ilene Grabel, *Membongkar mitos neoliberal; Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan*, Yogyakarta: Insist Press, 2008, hal 14

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penjelasan di atas adapun yang menjadi sorotan permasalahan yang akan dicoba dilihat adalah:

1. Benarkah globalisasi dan sistem neoliberal ini dapat membawa suatu pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi negara-negara berkembang, dan dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang ada?
2. Siapa sebenarnya orang-orang yang paling diuntungkan dari kondisi globalisasi dan sistem neoliberal yang tercipta dan terus mengalami perkembangan saat ini?

3. Kerangka Berpikir

3.1. Pendekatan Ekonomi Politik

Kenyataan menyolok yang menandai politik dunia sesudah Perang Dunia II adalah perubahan yang besaran, luasan dan kedalamannya luar biasa. Munculnya Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet (US) sebagai negara adidaya, kemerosotan dan kemudian kebangkitan kembali Eropa dan Jepang sebagai aktor utama, peningkatan status beberapa negara sedang berkembang (NSB) menjadi negara industri baru (NIB), peredaan ketegangan Timur-Barat dan peningkatan ketegangan Utara Selatan, perubahan drastis sistem politik Uni Soviet di bawah Mikhail Gorbachev, ambruknya pemerintahan komunis di Eropa Timur dsb. Adalah beberapa contoh ungkapan perubahan-perubahan itu.

Hal-hal ini adalah bukti bahwa semakin banyaknya isu-isu ekonomi yang masuk ke dalam agenda percaturan politik internasional tingkat tinggi. Sehingga isu-isu ekonomi

yang sebelumnya dipandang sebagai persoalan “low politics” yang penuh damai, tidak dapat lagi dipisahkan dari isu-isu politik dan keamanan yang sejak lama dipandang sebagai masalah “high politics” yang penuh konflik.

Paling tidak sejak awal 1970-an, hampir setiap hari berita utama berbagai media massa dipenuhi dengan persoalan ekonomi yang semakin lama semakin gawat dan kontroversial. Masalah-masalah seperti kelangkaan dan kenaikan harga minyak bumi, nilai tukar komoditi ekspor dari NSB dan aturan main perdagangan yang merugikan mereka, defisit neraca perdagangan maupun neraca pembayaran berbagai negara, kemerosotan dollar, investasi asing langsung oleh perusahaan multinasional (PMN), bantuan asing, ketergantungan negara-negara Dunia Ketiga, inflasi dunia, pengangguran, kemiskinan, dsb.

Hal ini membuat para analisis politik internasional untuk menilai implikasi politik dari transaksi ekonomi internasional. Namun sayangnya, kebanyakan isu yang mengkaitkan ekonomi dan politik tidak banyak dibicarakan dalam perkuliahan hubungan internasional. Hal ini disebabkan karena ekonomi dan politik ditangani sebagai dua disiplin akademik yang berbeda, kebanyakan mahasiswa tidak bisa memahami dengan baik isu-isu ekonomi politik internasional.

Ketidakpuasan diantara para akademisi akibat jauhnya perbedaan antara model-model abstrak tentang perilaku politik dan ekonomi yang diciptakan para ilmuwan politik maupun ekonomi dengan perilaku aktual dalam sistem politik dan sistem ekonomi yang digambarkan membuat latar belakang kemunculan ekonomi politik. Semakin canggih dan abstrak. Semakin tidak realistis teori yang mereka ciptakan itu. Karena itu banyak ilmuwan yang mempertanyakan keabsahan intelektual dari pemisahan analitik antara politik dan ekonomi.

Selain itu, ada kenyataan bahwa begitu stabilitas dan kemakmuran yang dinikmati masyarakat dunia, terutama di negara-negara industri maju, sejak Perang Dunia II mulai merosot pada awal 1970-an, isu ekonomi menjadi terpolitisasi, dan berbagai sistem politik menjadi sibuk oleh urusan ekonomi.

Dalam pengertian yang sangat umum, ekonomi politik internasional adalah studi tentang saling hubungan antara ekonomi dan politik dalam arena internasional. Yaitu bagaimana soal-soal ekonomi seperti inflasi, defisit neraca perdagangan atau pembayaran penanaman modal asing efisiensi produksi dan berkaitan dengan urusan bentuk internasional dan politik domestik.

Dalam pengertian yang lebih spesifik bisa disebutkan bahwa fokus perhatian ekonomi-politik internasional adalah hubungan antara dinamika pasar dengan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pasar itu di tingkat domestik maupun internasional. Ini berarti bahwa studi ekonomi politik internasional adalah studi tentang hubungan antara politik domestik di berbagai negara dengan ekonomi internasional; atau sebaliknya, ini adalah studi tentang dampak kekuatan pasar yang beroperasi dalam ekonomi internasional terhadap politik domestik negara-negara tertentu.

3.2. Perspektif Liberal

Perspektif ini pada awalnya muncul sebagai alternatif yang diajukan oleh para pengkritik merkantilisme yang dipelopori oleh Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo, mereka menentang pengendalian ekonomi domestik dan internasional berlebihan yang dilakukan kaum merkantilisme demi membangun negara-bangsa yang kuat antara

abad 16 dan 19. Smith, Ricardo dan para pengikut mereka, yang kemudian terkenal dengan sebutan kaum liberal, mengajukan argumen bahwa filsafat yang melandasi praktek merkantilisme itu salah. Kaum liberal ini mengatakan bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan kekayaan nasional justru adalah dengan membiarkan pertukaran antar individu dalam ekonomi domestik dan internasional berjalan secara bebas dan tidak usah dibatasi. Dengan kata lain, mereka menganjurkan pasar bebas.

Konsepsi liberal Ricardian-Smithian ini didasarkan pada gagasan mengenai kedaulatan pasar dalam proses ekonomi dan mengasumsikan adanya keselarasan kepentingan secara alamiah diantara berbagai manusia dan berbagai bangsa. Karena itu, kalau individu dibiarkan bebas mengejar kepentingannya sendiri dalam suatu ekonomi perdagangan yang didasarkan pada suatu pembagian kerja dan pada struktur atau komposisi faktor-faktor produksinya sendiri, maka kesejahteraan suatu kelompok individu, suatu bangsa atau suatu kelompok bangsa secara keseluruhan akan bisa ditingkatkan.

Selanjutnya, kaum liberal berasumsi bahwa individu (yaitu konsumen, perusahaan atau wiraswasta individual) adalah aktor utama dalam ekonomi-politik dan merupakan unit analisis yang sebenarnya. Walaupun ini nampaknya cukup jelas dan lumrah saja, karena semua kegiatan sosial pada akhirnya memang berasal dari individu, asumsi pertama ini menjadi penting kalau kita perbandingkan dengan asumsi perspektif radikal dan merkantilisme. Selain itu, kaum liberal juga menganggap bahwa individu adalah aktor yang rasional dan selalu berusaha memaksimalkan perolehan.

Tindakan rasional adalah tindakan yang didasarkan pada kalkulasi untung-rugi atas berbagai pilihan kemungkinan. Seorang aktor dianggap memaksimalkan perolehan kalau ia, sesudah melakukan kalkulasi untung-rugi tentang berbagai kemungkinan, memilih

pilihan yang menghasilkan kepuasan subyektif paling tinggi. Ini bukan berarti bahwa individu akan betul-betul memperoleh keuntungan dari setiap pilihan rasional itu. Dalam keadaan tertentu, upaya memaksimalkan hasil itu bisa saja berarti individu itu memilih pilihan yang paling kurang buruk.

Kaum liberal dengan sungguh-sungguh menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada dasar atau alasan untuk timbulnya konflik dalam hubungan ekonomi-politik. Bahkan hubungan ekonomi internasional bersifat harmonis dan saling menguntungkan bagi yang terlibat di dalamnya. Jadi, kalau perdagangan internasional dibebaskan dari pembatasan dan peraturan-peraturan pemerintah, setiap orang di dunia akan bisa memperoleh keuntungan sesuai dengan barang dan jasa yang tersedia dan, pada gilirannya, kesejahteraan mereka akan bisa meningkat.

Menurut kaum liberal, peranan negara seharusnya sangat terbatas. Menurut mereka, banyak bentuk intervensi pemerintah dalam ekonomi, sengaja maupun tidak, telah membatasi pasar dan karena itu mencegah terjadinya perdagangan yang secara potensial menguntungkan. Pemerintah memang memiliki peranan yang sah dan memang diperlukan untuk menciptakan dan memelihara keberadaan pasar yang bebas dan kompetitif. Pemerintah harus berperan mempertahankan negara, melindungi hak milik, dan mencegah persaingan tidak sehat atau munculnya monopoli di dalam pasar.

Kaum liberal juga percaya bahwa pemerintah-pemerintah yang terlibat seharusnya mengelola ekonomi internasional seperti halnya kalau mereka mengelola ekonomi domestik. Pemerintah-pemerintah itu harus menciptakan aturan main “rezim internasional” untuk mengatur pertukaran antara berbagai matauang nasional dan menjamin bahwa tidak

negara atau kelompok domestik yang dirugikan oleh kompetisis internasional yang “tidak sehat” atau tidak jujur.

Dengan demikian, menurut kaum liberal ekonomi dan politik umumnya merupakan bidang yang terpisah. Peran pemerintah terbatas pada pengelolaan pasar untuk menjamin bahwa semua perdagangan yang secara potensial menguntungkan bisa terlaksana. Kalau pasar berfungsi baik, tidak ada alasan ekonomik bagi timbulnya konflik politik, karena setiap orang akan memperoleh keuntungan.

3.3. Teori Sistem Kapitalis Dunia Immanuel Wallerstein

Berbagai macam teori dalam tahun-tahun terakhir ini memang telah mencoba menjelaskan fakta-fakta tentang kekayaan dan kemiskinan bangsa-bangsa. Salah satu model pemahaman teoritis yang mencoba memandang proses perubahan sosial, khususnya di negara dunia ketiga, adalah Teori Sistem Ekonomi Kapitalis Dunia, yang oleh sebagian pakar dianggap merupakan lanjutan dari teori ketergantungan (*dependensia*).⁶ Jika teori *dependensia* dilatarbelakangi oleh sejumlah intelektual yang membuat kelompok baru yang diberi nama ECLA (*Economic Commission for Latin America*) yang mencoba melihat situasi kemacetan ekonomi Negara-negara Amerika Latin serta keragu-raguan mereka terhadap teori pembangunan, teori sistem ekonomi kapitalis dunia ini lahir di Amerika sendiri yang mencoba muncul sebagai teori alternatif antara teori modernisasi dan teori *dependensia*. Alasan yang kuat untuk memunculkan teori ini adalah bahwa fenomena

⁶ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Insist Press, 2009, hal. 122

tata ekonomi kapitalis dunia tidak dapat dijelaskan, baik oleh teori modernitas maupun teori dependensia, secara memuaskan.⁷

Adalah Immanuel Wallerstein yang menjadi pelopor pertama dari teori ini yang mencoba merumuskan suatu focus analisis yang tertuju pada tata ekonomi kapitalis dunia (*The World Capitalist Economy School*). Pada awalnya teori ini banyak meminjam analisis teori dependensia seperti konsep mengenai ketimpangan nilai tukar yang terjadi sebagai akibat eksploitasi dari negara *periphery* atau pinggiran oleh negara *center* atau pusat. Namun ada beberapa konsep yang dikembangkan lebih lanjut oleh Wallerstein yaitu dengan mengajukan tiga kutub model yaitu: negara pusat, semi pinggiran, dan pinggiran. Sebab ia menganggap sistem ekonomi dunia sangat rumit dan terlalu sederhana jika hanya dua model kutub yaitu center dan periphery yang umumnya dianut oleh teori dependensia.⁸

Teori ini secara garis besar memang tidak jauh berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh teori dependensia akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah Wallerstein menambahkan peran yang dilakukan oleh wilayah semi-periphery yaitu sebagai aktor yang dieksploitasi oleh inti (*center*) tetapi sekaligus juga mengeksploitasi wilayah *periphery*.⁹ Pendekatan teori ini menjelaskan bahwa sistem ekonomi dunia telah menjadi celah peluang bagi pemindahan sumber daya dari pinggiran ke semi pinggiran dan dari pinggiran serta semi pinggiran ke pusat. Mekanisme pemindahan nilai dari pinggiran semi pinggiran dan pusat ini sendiri dapat bermacam-macam. Nilai mungkin bisa dipindahkan lewat perampasan langsung, pertukaran yang tidak seimbang, pertukaran barang-barang yang produktif dengan barang-barang yang tidak produktif, lewat pengendalian harga dan lain-

⁷ Ibid., hal 123

⁸ Ibid., hal 124

⁹ Loc.cit

lainya.¹⁰ Hal inilah yang kemudian menjadikan suatu kondisi di mana perkembangan ekonomi negara-negara periphery dikondisikan oleh semi periphery dan Negara semi periphery dikondisikan oleh perkembangan ekonomi negara-negara center (inti). Artinya dengan kata lain pembangunan dan pertumbuhan suatu negara yang terjadi saat ini selalu dibayar dengan keringat dan penderitaan negara lain bahkan tersingkirnya negara lain.

Inilah yang dianggap menjadi salah satu alasan mengapa periphery dan semi periphery menjadi terbelakang sebab adanya suatu hubungan dengan center (pusat) yang telah memeras surplusnya dan menggunakan hasil surplus itu untuk tujuan pembangunan di pusat sehingga teori ini kemudian meruntuhkan teori-teori sebelumnya yang mengatakan bahwa penghambat pembangunan di negara-negara terbelakang adalah kurangnya modal ataupun keterampilan swasta.

Di dalam bukunya Mansour Fakih yang berjudul "Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi" ia memaparkan dengan pendekatan tata ekonomi kapitalis dunia yang dicetuskan oleh Wallerstein dan pengikutnya pada dasarnya mencita-citakan suatu tata ekonomi dunia yang berkeadilan ekonomi dan politik, atau dunia yang demokratis dan egaliter. Untuk mencapai hal itu ke sana ada beberapa hal yang dapat diupayakan yaitu;

- Tumbuhnya gerakan sosial atau gerakan populis berskala global. Asumsi ini berangkat dari analisisnya bahwa tidak mungkin untuk mengembangkan suatu dunia yang adil dan demokratis jika strategi yang ditempuh oleh masing-masing negara adalah dengan melakukan pembangunan dan pertumbuhan nasional yang dilakukan oleh masing-masing negara. Sebab metode pembangunan dan pertumbuhan suatu Negara yang terjadi saat ini selalu dibayar dengan keringat dan

¹⁰ Ibid., hal 68

penderitaan negara lain bahkan tersingkirnya negara lain. Sehingga model kompetisi seperti ini harus diselesaikan oleh perjuangan kelas berskala global dan bukan lagi berskala nasional.

- Mengarahkan energy gerakan pada sumber surplus ekonomi, penyedotan surplus ekonomi global dengan cara mengurangi tingkat laba dan secara global memerhatikan persoalan pemerataan.

4. Hipotesis

Sesuai dengan rumusan masalah dan kerangka berfikir yang dijadikan sebagai rujukan awal maka adapun hipotesis ataupun kesimpulan sementara bahwa globalisasi telah gagal meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara, khususnya negara-negara berkembang dan negara dunia ketiga, dan mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Globalisasi di sisi lain malah menjadi peluang bagi negara maju untuk mengeksploitasi negara berkembang dan negara maju.

Pembahasan

1. Neoliberalisme Dongeng Indah Imperialisme Baru

Setelah model pembangunan mengalami keruntuhannya pada tahun 1997 yang ditandai dengan terjadinya krisis di Asia Timur, neoliberal segera menjadi pengganti dari model ini yang ditandai dengan liberalisasi di segala bidang yang dipaksakan melalui *Structural Adjustment Program* oleh lembaga financial global dan disepakati oleh rezim GATT dan Perdagangan bebas, suatu organisasi global yang dikenal dengan WTO (World Trade Organization). Saat itulah suatu era baru telah muncul dan menggantikan era sebelumnya yang dikenal dengan globalisasi. Istilah globalisasi sebenarnya secara sederhana dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global.¹¹

Perspektif merkantilis, yang mendominasi hubungan itu pada dekade 1920-an dan 1930-an, dan yang dianggap penyebab penting timbulnya Perang Dunia II, sejak pertengahan 1940-an digantikan oleh perspektif liberal dan kemudian dikembangkan oleh para penganutnya menjadi sistem neoliberal. Sistem neoliberal yang dicirikan dengan perdagangan bebas dianggap lebih efisien dibandingkan dengan sistem yang proteksionis. Sistem neoliberal juga dianggap dapat menguntungkan negara-negara yang menerapkan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi yang secara otomatis dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi permasalahan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Perdagangan dan persaingan bebas adalah cara terbaik bagi ekonomi nasional untuk berkembang. Kesempatan yang sama untuk menjual produksi unggulannya ditawarkan kepada tiap-tiap negara yang ada. Hal inilah yang kemudian menjadikan

¹¹ *Ibid.*, hal. 186

neoliberalisme dianggap sebagai jalan tunggal menuju pembangunan dan kemakmuran bagi negara berkembang dengan menerapkan tiga komponen utama neoliberalisme yaitu; menaikkan peranan pasar dalam pengelolaan ekonomi (melebihi peran pemerintah), meningkatkan peran dan lingkup serta hak miliki sektor swasta (melalui swastanisasi, deregulasi dll), dan menggembar-gemborkan ide “kebijakan ekonomi yang kuat” melalui anggaran berimbang, fleksibilitas tenaga kerja, inflasi rendah dll.¹²

Tawaran keuntungan yang didapat dari sistem neoliberal inilah yang kemudian membuat bukan hanya negara berkembang tetapi hampir semua negara yang ada melakukan suatu pertarungan besar mereka dengan meminimalkan peranan negara dan menyerahkannya pada mekanisme pasar.

Akan tetapi, pengaruh globalisasi tidak pernah merata, karena terdapat segmen yang signifikan dari penduduk dunia yang tidak tersentuh secara langsung oleh globalisasi, atau kebanyakan dari mereka tetap terpisah dari keuntungan yang dihasilkan oleh globalisasi.

Bahkan setelah dua dekade penerapan liberalisasi melalui penyebaran globalisasi, negara-negara, khususnya negara berkembang, menerapkan sistem neoliberal ini ternyata tidak membawa pertumbuhan ekonomi seperti yang dijanjikan. Hal ini dapat dilihat dari perekonomian Amerika Latin yang telah berhenti tumbuh dan Afrika Sub-Sahara mengalami pertumbuhan negatif. Di Amerika Latin dan Karibia GDP per kapita hanya tumbuh sekitar 7% dan Negara-negara Afrika Sub Sahara bahkan lebih mengejutkan GDP per kapita jatuh mendekati sekitar 15%.¹³

¹² Ha-Joon Chang, *op.cit.*, ha.l 12

¹³ *Ibid.*, hal 15

Hal ini tentu saja juga mengakibatkan dampak semakin memburuknya kesenjangan dalam negeri dan antar bangsa serta semakin meningkatnya kemiskinan. Menurut data UNDP (*United Nation Development Programme*) saat ini ada sebanyak 2,8 miliar orang hidup kurang dari \$2/hari, sementara 1,2 miliar lainnya, hidup kurang dari \$1/hari (2002:2). Di sub-Sahara Afrika sendiri, setengah dari jumlah penduduknya saat ini lebih miskin dibanding pada tahun 1990 dan 46% penduduk hidup kurang dari \$1/hari (UNDP,2002:17). Di Asia Selatan, 40% penduduk saat ini hidup di bawah \$1/hari (UNDP, 2001:10).

Sementara di sisi lain kesenjangan terus terjadi antara negara maju, negara berkembang dan negara dunia ketiga yang dapat dilihat dari data UNDP (*United Nation Development Programme*) yang menemukan bahwa pada tahun 1960, negara-negara yang 20% penduduknya merupakan golongan terkaya dari populasi dunia meraup pendapatan 30 kali lipat dibandingkan negara-negara yang 20% penduduknya merupakan golongan termiskin dari populasi dunia. Pada tahun 1980, awal era neoliberal, rasio tersebut mencapai 45:1, dan pada tahun 1989 rasio tersebut naik menjadi 59:1, dan mencapai 70:1 pada tahun 1997 (UNDP,2001, 1999).

Inilah salah satu alasan mengapa sebagian para ahli memandang konsep globalisasi sebagai sangat tidak memuaskan. Jadi, di satu pihak, globalisasi dipercaya mencerminkan perubahan struktural yang sebenarnya dalam skala organisasi sosial modern, seperti yang terbukti, misalnya dalam pertumbuhan berbagai perusahaan multi-nasional, pasar uang dunia, difusi kebudayaan pop, dan kerusakan lingkungan global dan sebagainya. Di pihak lain, globalisasi dianggap tak lebih sebagai 'mitos yang dibutuhkan'; melalui mana politisi dan pemerintah mendisiplinkan warga negaranya agar menyesuaikan diri dengan persyaratan pasar global.

Untuk memahami fenomena ini mungkin model “struktur interaksi feodal” yang dikembangkan Johan Galtung mungkin bisa membantu. Dalam struktur hubungan feodal, tidak ada kekuasaan pusat yang kuat. Dinamika politik ditentukan oleh pengaturan yang ditentukan oleh beberapa pangeran feodal yang berpengaruh. Raja di pusat lebih banyak berfungsi sebagai lambang dan tanpa kekuasaan yang efektif. Karakteristik struktur interaksi negara-negara masa kini, yaitu hubungan “center periphery”, menurut Galtung mirip dengan ciri-ciri masyarakat feodal yaitu:

1. Interaksi antara Center dan Periphery bersifat vertikal.
2. Interaksi antara Periphery dengan Periphery tidak terjadi.
3. Interaksi multilateral yang melibatkan ketiganya (Periphery Center-Periphery) tidak terjadi;
4. Interaksi dengan dunia luar dimonopoli oleh Center, dan ini mengakibatkan dua hal;
 - a. Interaksi antara Periphery dengan negara-negara Center lain tidak terjadi
 - b. Interaksi antara Center maupun Periphery yang di lingkungan negara-negara Center lain tidak terjadi.

Konsekuensi dari struktur hubungan seperti itu adalah sebagai berikut:

1. Interaksi Vertikal

Negara Center dan negara Periphery mengembangkan suatu mekanisme pembagian kerja, di mana negara Center berperan lebih besar daripada negara Periphery. Negara-negara Center memiliki hak-hak prerogatif dan

tanggungjawab yang lebih besar, misalnya menjadi anggota istimewa organisasi internasional, seperti PBB. Setiap negara Periphery mengarahkan hubungannya terutama kepada center nya masing-masing.

2. Fragmentasi

Karena interaksi antar-Periphery tidak ada atau hampir tidak ada, sedangkan interaksi antar-Center sangat intensif, maka terjadilah fragmentasi. Sementara negara-negara Center sangat erat berhubungan satu sama lain, negara-negara Periphery justru cerai berai.

3. Marginalisasi

Interaksi multilateral yang melibatkan berbagai Center dan berbagai Periphery sangat jarang. Akibatnya, negara-negara Periphery terkena marginalisasi, yaitu dalam forum diplomasi multilateral mereka umumnya hanya menjadi penonton di pinggiran.

4. Monopolisasi

Interaksi antara satu Center dengan Periphery-nya sangat ekstensif, meliputi berbagai bidang. Akibatnya, terjadilah monopoli hubungan oleh Center itu.

Hal inilah yang dikatakan oleh Immanuel Wallerstein bahwa sistem ekonomi kapitalis dunia telah menciptakan suatu kondisi pemindahan sumber daya dan kekayaan dari wilayah periphery dan semi periphery ke wilayah center (inti) yang mengakibatkan pemusatan keuntungan hanya pada satu wilayah yaitu wilayah center (inti). Sehingga

ketimpangan seperti yang diperlihatkan oleh data menjadi semakin meningkat sebagai akibat dari pemusatan keuntungan tersebut. Sehingga negara-negara maju di satu sisi terus mengalami peningkatan kekayaan sementara di sisi lain negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga terus dieksploitasi dan mengalami keterpurukan dari hari ke hari yang dilakukan oleh Negara-negara maju.

Bahkan negara periphery merupakan wilayah yang paling merasakan dampak dari sistem ekonomi kapitalis ini yang menurut Wallerstein menjadi pusat eksploitasi yang tidak hanya dilakukan oleh negara center (inti) tetapi juga dilakukan oleh negara semi periphery. Hal ini dapat dilihat dari situasi negara-negara sub-Sahara Afrika. Pada tahun 1960, pendapatan per kapita di sub-Sahara Afrika sekitar 11% dari pendapatan per kapita di negara-negara industri dan pada tahun 1998 bukannya mengalami peningkatan, pendapatan per kapitanya malah mengalami penurunan hingga setengah dari angka tersebut (UNDP,2001:16).

Globalisasi dan perdagangan bebas yang pada awalnya menawarkan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya merupakan rekayasa sistem yang sengaja diciptakan untuk memberikan peluang bagi semua negara maju untuk memperoleh kekayaannya dengan cara merampok dan mengeksploitasi negara-negara lain. Sehingga pada akhirnya sistem yang ada saat ini bukannya menawarkan suatu sistem perekonomian global yang adil melainkan menjadikan suatu pola eksploitasi baru di mana kekayaan maupun kemiskinan di antara bangsa-bangsa adalah akibat proses penghisapan menyeluruh yang dilakukan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Atau dengan kata lain kita dapat sampai pada suatu kesimpulan bahwa globalisasi dan neoliberalisme ternyata telah menciptakan “the development of under development” atau “pembangunan keterbelakangan”



Di negara berkembang, globalisasi menyebabkan kelompok miskin tidak mampu bersaing karena kurangnya akses terhadap pendidikan, teknologi, kredit, kepemilikan tanah, pasar dan biaya transportasi yang tinggi. Hal ini terjadi karena akibat kebijakan pemerintah yang cenderung memihak pasar global dan tidak memberi cukup perlindungan terhadap kelompok miskin dan lingkungan.

Di dalam bukunya Mansour Fakih yang berjudul "Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi" ia memaparkan dengan pendekatan tata ekonomi kapitalis dunia yang dicetuskan oleh Wallerstein dan pengikutnya pada dasarnya mencita-citakan suatu tata ekonomi dunia yang berkeadilan ekonomi dan politik, atau dunia yang demokratis dan egaliter. Untuk mencapai hal itu ke sana ada beberapa hal yang dapat diupayakan yaitu;

- Tumbuhnya gerakan sosial atau gerakan populis berskala global. Asumsi ini berangkat dari analisisnya bahwa tidak mungkin untuk mengembangkan suatu dunia yang adil dan demokratis jika strategi yang ditempuh oleh masing-masing negara adalah dengan melakukan pembangunan dan pertumbuhan nasional yang dilakukan oleh masing-masing negara. Sebab metode pembangunan dan pertumbuhan suatu Negara yang terjadi saat ini selalu dibayar dengan keringat dan penderitaan negara lain bahkan tersingkirnya negara lain. Sehingga model kompetisi seperti ini harus diselesaikan oleh perjuangan kelas berskala global dan bukan lagi berskala nasional.
- Mengarahkan energy gerakan pada sumber surplus ekonomi, penyedotan surplus ekonomi global dengan cara mengurangi tingkat laba dan secara global memerhatikan persoalan pemerataan.

2. TNC, WTO, IMF dan Bank Dunia

Di awal kemunculannya globalisasi berusaha meyakinkan rakyat miskin di dunia ketiga seolah-olah merupakan arah baru yang menjanjikan harapan kebaikan bagi umat manusia dan seolah menjadi keharusan sejarah manusia di masa depan.¹⁴ Namun di sisi lain ternyata setelah hampir tiga dekade berjalannya globalisasi ini, ternyata malah melahirkan berbagai kecemasan baru. Hal ini didasari dari sejumlah fakta yang menunjukkan semakin meningkatnya kemiskinan rakyat dan persoalan keadilan sosial. Kemudian tentu saja timbul suatu pertanyaan baru jika ternyata negara berkembang, yang jika merunut pada konsep awal neoliberal merupakan pihak yang akan mendapatkan keuntungan, ternyata malah menjadi korban dalam sistem ini sendiri lantas sebenarnya siapa yang menjadi paling banyak diuntungkan dengan adanya kondisi globalisasi dan sistem neoliberal ini. Sebelum menjawab pertanyaan kedua ini ada baiknya mungkin jika kita sedikit mengulang kembali mengenai sejarah globalisasi.

Pada dasarnya globalisasi terjadi ketika ditetapkannya formasi sosial global baru dengan ditandai oleh diberlakukannya secara global suatu mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan perdagangan bebas yang ditandai dengan berhasilnya ditandatangani kesepakatan internasional tentang perdagangan pada bulan April tahun 1994 yaitu perjanjian *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* yang merupakan suatu kumpulan aturan internasional yang mengatur perilaku perdagangan antarpemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan menjadikannya sebagai suatu lembaga yang dikenal dengan *World Trade Organization (WTO)*.¹⁵

¹⁴ Mansour Fakih, *op.cit.*, hal. 176

¹⁵ *Ibid.*, hal. 188

Maka dimulailah suatu perubahan besar di dalam sistem perekonomian, dimana dahulunya sistem perekonomian yang dianut adalah integrasi ekonomi nasional yang menempatkan negara sebagai salah satu kekuatan tertinggi saat ini secara perlahan sudah mulai bergeser menuju sistem global yang dikenal dengan globalisasi korporasi.¹⁶ Di mana terjadi penambahan aktor-aktornya yang dulu mungkin hanya didominasi oleh negara. Adapun beberapa aktor-aktor baru tersebut seperti perusahaan transnasional (TNCs), lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia dan *International Monetary Fund* (IMF), serta birokrasi perdagangan regional dan global seperti WTO, NAFTA, APEC, ASEAN dan sebagainya.¹⁷ Kesemua aktor-aktor baru ini pada intinya secara perlahan telah menggeser peranan negara dengan pasar bebas.

Pasar bebas yang membuka kesempatan bagi investasi asing untuk masuk dan menanamkan modalnya di suatu negara ternyata malah menjadi suatu peluang baru bagi negara-negara maju untuk mengeksploitasi sumber daya di suatu negara berkembang baik itu dalam bentuk konsumen pasar, tenaga kerja murah dan sumber daya alam.

Pada dasarnya semua proses pengintegrasian ekonomi nasional menjadi ekonomi global (globalisasi) merupakan harapan dan hasil perjuangan dari perusahaan-perusahaan transnasional, karena pada dasarnya merekalah yang paling diuntungkan dari proses tersebut. Hal ini dapat dilihat dari dua dasawarsa perusahaan-perusahaan transnasional berskala raksasa (TNCs) ternyata telah meningkat jumlahnya secara pesat dari sekitar 7.000 TNCs pada tahun 1970 dan dalam tahun 1990 jumlah itu mencapai 37.000 TNCs. Selain jumlahnya meningkat, TNCs juga dapat menguasai perekonomian dunia.

¹⁶ Mansour Fakhri, *Bebas Dari Neoliberalisme*, Yogyakarta: Insist Press, 2010, hal. 9

¹⁷ Mansour Fakhri, *Runtuhnya Teori Pembangunan*, *op.cit.*, hal. 187

Diperkirakan saat ini ada sekitar 100 TNCs yang mampu menguasai ekonomi dunia dan mereka mampu mengontrol sampai 75% perdagangan dunia.¹⁸

Dari peningkatan jumlah korporasi ini jelas sekali menjadi salah satu bukti bahwa mereka adalah aktor yang paling banyak diuntungkan dengan adanya liberalisasi ekonomi yang diterapkan oleh tiap-tiap negara. Dengan terbukanya pasar terhadap investasi asing ternyata memudahkan negara-negara maju yang diwakilkan oleh perusahaan-perusahaan asingnya untuk melakukan ekspansi terhadap negara berkembang dan negara dunia ketiga. Konsolidasi sistem fabrikasi dunia pada dasarnya merupakan usaha penciptaan hierarki jaringan produksi dan perdagangan skala global dari perusahaan-perusahaan transnasional (TNCs).¹⁹ Artinya di sini tindakan liberalisasi ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga ternyata juga hanya sebagai alat yang dipergunakan perusahaan-perusahaan asing untuk menyerap kekayaan negara-negara tersebut di samping kegiatan eksploitasi sumber daya yang juga tengah dilakukan. Artinya negara berkembang dan negara dunia ketiga diperlukan untuk menciptakan jaringan bagi pelemparan pasar barang produksi perusahaan-perusahaan asing ini.

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa globalisasi dan sistem neoliberal sebenarnya memang telah dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah dan menguntungkan perusahaan-perusahaan asing seperti perusahaan multinasional dan perusahaan transnasional.

WTO dianggap sebagai suatu organisasi yang mengatur jalannya perjalanan perdagangan internasional yang terjadi sehingga bisa tercipta perdagangan internasional yang adil ternyata hanya dijadikan alat untuk memudahkan kepentingan-kepentingan

¹⁸ *Ibid.*, hal 190

¹⁹ *Ibid.*, hal 191

perusahaan transnasional. Bank Dunia dan IMF yang di awal pembentukannya sebagai suatu lembaga keuangan yang bertugas mengawasi sistem moneter internasional dan memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang mengalami krisis juga lagi-lagi dijadikan sebagai alat oleh negara-negara maju untuk mempercepat terjadinya liberalisasi ekonomi di negara-negara dunia ketiga dan berkembang. Hal ini dapat dilihat dari pencantuman salah satu persyaratan hutang di dalam *Structural Adjustment Program* yang pada intinya berusaha untuk mendesak dan memaksa negara-negara untuk melakukan penyesuaian kebijakan nasionalnya ke dalam ekonomi global yang tujuannya sebagai jalan pelicin untuk memudahkan perusahaan-perusahaan transnasional dan memberi perlindungan terhadap mereka untuk beroperasi.²⁰

IMF dianggap mempermudah terciptanya kekuatan ekonomi global dan restrukturisasi ekonomi yang merugikan rakyat juga telah menimbulkan hasil yang tidak diharapkan. Seperti apa yang diungkapkan oleh Kausar (2007) IMF dan World Bank merupakan salah satu bentuk imperialisme yang menjadikan permasalahan bagi negara berkembang dengan memanipulasikan dunia melalui organisasi politik dan ekonomi dunia.

Mischele Chossudovsky berusaha memetakan gambaran mengenai kemiskinan di beberapa negara akibat perkembangan globalisasi ini. Kemiskinan pada negara-negara tersebut salah satunya disebabkan oleh liberalisasi perdagangan bebas yang dilakukan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) serta kebijakan ekonomi yang dipaksakan untuk diterapkan pada negara-negara tersebut oleh lembaga keuangan dunia semacam Bank Dunia (*World Bank*) dan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*). Berdasarkan pemetaan Michele Chossudovsky jelas terlihat bahwa

²⁰ Ibid., hal 195

globalisasi ekonomi didorong oleh kuatnya era perdagangan bebas dan pasar terbuka yang akhirnya akan berdampak pada perdagangan antar negara yang terkait ekspor impor.

Dewan perserikatan perdagangan seperti WTO dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia memang sangat diperlukan oleh perusahaan-perusahaan transnasional untuk melakukan reformasi kebijakan di tiap-tiap negara sebab internasionalisasi produksi yang dianggap sebagai salah satu gejala globalisasi memang memerlukan kemudahan secara global.

Sehingga pada akhirnya globalisasi menciptakan tiga aktor utama seiring dengan perkembangannya. Aktor pertama adalah TNCs, yakni perusahaan multinasional yang besar yang dengan dukungan negara-negara yang diuntungkan oleh TNCs tersebut membentuk organisasi perdagangan global yang saat ini dikenal dengan WTO yang menjadi aktor kedua. Dan aktor terakhir adalah lembaga keuangan global yaitu IMF dan Bank Dunia. Ketiga aktor ini pada akhirnya mendesak dan mempengaruhi negara-negara untuk melakukan penyesuaian kebijakan nasionalnya ke dalam ekonomi global.²¹

Liberalisasi pasar tidak hanya telah meningkatkan jumlah pesaing; tetapi juga telah mengakibatkan semakin banyak pembeli yang dapat dijangkau, baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal. Bisnis ekspor telah mengembangkan dengan cepat kemajuan teknisnya untuk mengatasi upah buruh yang lebih murah yang terdapat di belahan dunia lainnya.

Hal ini telah memaksa seluruh negara, tidak peduli siapa yang memerintah, untuk terlibat dalam suatu persaingan menarik penanaman modal ke dalam negeri. Ancaman

²¹ Ibid., hal 191

untuk menghentikan penanaman modal terhadap suatu negeri diterima oleh setiap pemerintah sebagai suatu berita pengenyahan pemerintahan itu di masa depan.

Bila penanaman modal berkurang, atau bahkan tidak adanya penanaman modal sama sekali, maka angka pengangguran akan meningkat secara cepat. Angka pengangguran yang meningkat itu pada gilirannya memberikan tanda peringatan awal akan adanya kekalahan dalam tantangan globalisasi.

Globalisasi tidak membuat lowongan kerja menjadi lebih sedikit. Revolusi industri itulah yang membuatnya. Jadi hampir tidak disangkal bahwa untuk beberapa dasawarsa ke depan, sebagian besar lapangan pekerjaan baru kemungkinan akan datang dari sektor jasa. Tetapi dimanakah orang akan menemukan lapangan pekerjaan yang baru ketika bank-bank, kelompok bisnis pemberi pinjaman uang, perusahaan asuransi, tidak hentinya mengurangi jumlah karyawannya. Tak dapat disangkal bahwa kemajuan teknis selama 250 tahun terakhir telah membuat tenaga buruh manusia semakin tidak diperlukan.

Namun, dua perselisihan tentang status globalisasi pada gilirannya juga tidak pernah dapat memberikan penjelasan akhir tentang bagaimana hubungan globalisasi dan kenyataan mengenai kemiskinan dan ketimpangan global, meskipun data-data tentang ketimpangan kemanusiaan dan kemiskinan global dewasa ini sedemikian dramatik dan luas diketahui.

Pertama, berkenaan dengan ketimpangan global. Laporan UNDP tahun 1999 misalnya, menunjukkan bahwa sejak awal tahun 1980an, ketimpangan domestik, meningkat dalam banyak negara seperti China, Eropa Timur dan Persemakmuran Negara Merdeka dan dalam negara-negara OECD seperti swedia, Inggris dan Amerika Serikat, sementara ketimpangan antar negara juga meningkat karena jurang pendapatan diantara

seperlima penduduk dunia yang hidup di negara-negara kaya dan seperlima yang hidup di negara-negara miskin adalah 74 berbanding 1 dalam tahun 1971, meningkat dari 60 berbanding 1 dalam tahun 1990 dan 30 berbanding 1 dalam 1960, sebagai tambahan bahwa lebih dari 80 negara memiliki pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan satu atau lebih dekade yang lalu, dan meskipun 40 negara dapat mempertahankan pertumbuhan pendapatan per kapita rata-rata lebih dari 3 persen per tahun sejak 1990, 55 negara, kebanyakan di sub Sahara Afrika dan Eropa Timur dan CIS, mengalami penurunan pendapatan per kapita.

Jadi, meskipun telah terjadi integrasi ekonomi global selama beberapa dekade terakhir, ketimpangan global juga mengalami peningkatan. Akan tetapi, ketimpangan global bukan hal baru, dan fenomena ketimpangan ekonomi global telah ada sejak lama, meskipun dengan kecenderungan meningkat terus menerus.

Datanya adalah 'kesenjangan pendapatan antara seperlima orang yang hidup dalam negara-negara kaya dan seperlima dalam negara-negara miskin adalah 74 berbanding 1 dalam tahun 1997, meningkat dari 69 berbanding 1 dalam tahun 1990 dan 30 berbanding 1 dalam tahun 1960. Estimasi semula adalah 11 berbanding 1 untuk tahun 1820.

Kedua, berkenaan dengan kemiskinan global, faktanya juga sama jika tidak lebih menyedihkan. Kenyataan menunjukkan bahwa sekitar seperempat dari jumlah manusia yang hidup sekarang ini 1,5 milyar, berada di bawah garis kemiskinan internasional, jadi tingkat pembelanjaan atau pendapatan untuk mencukupi kebutuhan minimum makanan yang cukup bergizi, plus kebutuhan non-makanan yang tidak dapat dicapai.

Terlepas dari persoalan bagaimana mengukur kemiskinan global, akibat dari hal itu memang sangat serius, karena akan berarti bahwa 790 juta orang tidak cukup makan, 1 milyar tidak dilengkapi air yang sehat, dan 2,4 milyar tanpa sanitasi dasar; lebih dari 880 juta tidak punya akses pada pelayanan kesehatan; sekitar satu milyar tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan dua milyar hidup tanpa listrik.

Disamping itu, dua dari lima anak-anak di negara berkembang terhambat pertumbuhannya, satu dari tiga anak memiliki berat tubuh di bawah normal, dan satu dari sepuluh anak tersia-siakan. Selain itu, seperempat dari jumlah anak-anak di dunia yang berumur antara lima sampai empat belas tahun, 250 juta secara keseluruhan, harus bekerja di luar rumah untuk mendapatkan upah, seringkali harus mengalami kondisi yang sangat sulit, naik dalam pertanian, konstruksi, tekstik, atau produksi karpet misalnya, atau sebagai tentara, pekerja seks, atau pembantu rumah tangga.

Tentu saja, anak-anak tidak mendapatkan cukup pendidikan, dan sebagian dari mereka, jika dapat bertahan hidup cukup lama, kemungkinan akan termasuk dalam kelompok orang dewasa yang buta huruf yang jumlahnya mencapai satu milyar sekarang.

Maka, meskipun kesimpulan mengenai hubungan globalisasi di satu pihak, dan kemiskinan dan ketimpangan global di pihak lain tetap diperdebatkannya, keduanya merupakan masalah mendesak dan perlu mendapatkan prioritas utama dalam agenda studi keadilan untuk membantu pengambilan keputusan. Tentu saja, studi tentang fenomena globalisasi dalam dirinya sendiri akan membuka cakrawala yang lebih luas dan mendalam mengenai hukum-hukum perubahan sosial di era sekarang ini, misalnya, karena pengetahuan kita mengenai hubungan-hubungan kekuasaan yang mendasari kemiskinan dan

keyimpangan akan bertambah, namun melepaskan pengetahuan globalisasi dari rasa prioritas keadilan akan membawa pada usaha yang remeh dan sia-sia.

Kesimpulan dan Saran

Selama beberapa tahun lalu, kita sungguh disesaki oleh sekian pernyataan yang digembar-gemborkan para penganjur globalisasi ekonomi maupun pemimpin lembaga-lembaga Bretton Woods (dalam hal ini Bank Dunia, IMF, WTO). Bahwa tujuan utama mereka mendesak globalisasi ekonomi adalah untuk membantu kaum miskin di dunia. Mereka berpendirian bahwa dengan menghilangkan sejumlah hambatan terhadap perdagangan perusahaan besar dan berbagai investasi keuangan, maka itulah gagasan terbaik menuju pertumbuhan. Dan jalan terbaik untuk keluar dari kemiskinan. Mereka juga berpendapat bahwa berjuta-juta orang yang menentang model globalisasi ekonomi akan merugikan kaum miskin sendiri.

Akan tetapi setelah tiga decade berjalannya globalisasi ini ternyata globalisasi tidak kunjung membawa peningkatan ekonomi bagi negara dunia ketiga dan negara berkembang. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kemiskinan yang dari hari ke hari bukan mengalami penurunan tetapi malah mengalami peningkatan yang pesat. Liberalisasi ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang dan dunia ketiga ternyata hanya dijadikan sebagai salah satu cara negara-negara maju untuk dapat untuk melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara dunia ketiga dan berkembang serta untuk mendapatkan tenaga-tenaga kerja yang murah. Pasar bebas di sisi lain ternyata pada kenyataannya sangat sulit untuk dapat ditembus oleh negara-negara kecil dan pada akhirnya lagi-lagi hanya menjadikan peluang bagi negara maju untuk menjadikan negara berkembang dan dunia ketiga sebagai sasaran pasar untuk menjual barang-barang produksi mereka. Sehingga pada akhirnya globalisasi yang selalu

diidentikkan dengan liberalisasi ekonomi tidak membawa perubahan banyak untuk meningkatkan perekonomian nasional dan mengatasi permasalahan kemiskinan.

IMF memegang tali kekang neokolonialisme atas negara sedang berkembang sebagai akibat “krisis hutang” Dunia ketiga pada 1980-an. Pada 1970-an, sejumlah bank dagang memperluas pinjaman ke negara-negara sedang berkembang dan negara merdeka. Awalnya mereka memberi bunga yang sangat rendah, akan tetapi ketika suku bunga dinaikkan dengan tajam di awal 1980-an, negara-negara yang memiliki hutang sangat besar tidak mampu membayar. Secara serentak negara-negara tersebut berhutang pada Bank Dunia dan tampil IMF. Dan akhirnya negara-negara tersebut terjatuh hutang dengan IMF dengan segala paket kebijakannya dan harus menjalankan SAP (*Structural Adjustment Programmes*).

Karena keharusan melunasi hutang yang sangat besar, negara-negara tersebut tidak punya pilihan lain, kecuali menyetujuinya. Hasilnya, perekonomian nasional hancur dan runtuh, anggaran belanja pendidikan dan rumah sakit menyusut drastis, kemiskinan dan kelaparan meningkat, dan lingkungan hidup rusak berat.

WTO sendiri muncul disebabkan oleh prinsip propaganda Amerika dan untuk menjual WTO ke selatan, para propagandis Amerika Serikat membangkitkan ketakutan bahwa apabila mereka tidak mau bergabung dengan WTO, negara yang bersangkutan akan diisolir dari perdagangan dunia (seperti Korsel). Dan mereka juga mengumbar janji bahwa sistem yang berbasis pada kaidah perdagangan dunia semacam itu akan melindungi negara-negara lemah dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh penguasa-penguasa besar perdagangan. Tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa globalisasi ekonomi membuat segala sesuatu menjadi lebih buruk bagi orang-orang miskin, terlebih lagi, jika perundingan

dalam GATS(*General Agreement on Trade in Services*) WTO akhirnya ditanda tangani,maka pelayanan publik yang paling minimal pernah ada sekalipun akan benar-benar lenyap.

• Ulasan tentang IMF dan WTO memperlihatkan bahwa Struktur Internasional saat ini bertanggung jawab atas kekacauan dalam perekonomian dunia. Lembaga-Lembaga Internasional ini memaksakan dogma pasar bebas dengan iming-iming kemakmuran bersama. Tetapi kenyataannya kegagalan dogma itu lebih terlihat di lingkungan pertanian Dunia Ketiga. Petani-petani kehilangan lahan, kehilangan pekerjaan, dan akhirnya petani-petani itu mati sekarat kelaparan. Peraturan Internasional diciptakan sedemikian rupa sehingga petani-petani Dunia Ketiga merupakan kelompok yang sering dijadikan sasaran empuk para kapitalis global. Sedangkan para petani Di Dunia pertama (Amerika Serikat, Eropa, Jepang) malah mendapat proteksi.

Ada beberapa contoh khusus di mana sejumlah perbaikan bisa di capai di negara Dunia Ketiga dalam jangka waktu singkat. Negara-negara tersebut seperti Taiwan,Korsel,Singapura,dan Malaysia,perbaikan yang terjadi di sana sesungguhnya bukanlah hasil dari kemauan mereka mengikuti berbagai aturan rezim Bretton Woods(IMF,WTO,Bank Dunia),melainkan dari kemauan mereka untuk melakukan kebalikan dari apa yang diperintahkan lembaga-lembaga tersebut. Sebagai contoh negara-negara Asia yang telah mengalami sejumlah keberhasilan dalam mengembangkan perekonomiannya,mereka tidak memotong semua tarif seperti yang diminta oleh lembaga-lembaga globalisasi. Mereka juga tidak memperbolehkan masuknya perusahaan asing tanpa kontrol,dan tidak menghapuskan dukungan kepada bisnis dalam negeri,perekonomian lokal,maupun pertanian lokal. Dan mereka menggunakan strategi

pembangunan yang berorientasi ekspor. Sementara itu strategi yang di populerkan di Amerika latin, import substitution di anggap sebagai strategi yang salah.

Bagaimanapun juga, sebagian besar negara miskin tidak banyak menikmati keuntungan dari globalisasi. Seluruh kebijakan lembaga-lembaga Bretton Woods tidak dirancang untuk memberi keuntungan kepada negara-negara miskin, melainkan kepada negara-negara kaya dan berbagai korporasi global mereka. Itulah sebabnya menapa begitu banyak negara miskin di dunia berusaha bertahan dan bersatu padu menentang WTO dan IMF di seattle pada 1999. Liberalisasi ekonomi pada awalnya diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi negara berkembang dan maju untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi nasionalnya. Sebab proteksionisme negara dirasa sangat monoton dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan globalisasi yang semakin pesat dari hari ke hari. Ditambah lagi terjadi perkembangan yang sangat pesat di negara-negara maju baik dari sektor ekonomi maupun teknologi merupakan salah satu bukti keberhasilan yang akan dicapai apabila negara membuka diri terhadap persaingan pasar bebas. Hal inilah yang kemudian menjadikan banyak negara-negara dunia ketiga dan negara-negara maju melakukan penyesuaian diri mereka terhadap globalisasi dengan cara membuka perdagangan bebas.

Di dalam bukunya Mansour Fakih yang berjudul "Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi" ia memaparkan dengan pendekatan tata ekonomi kapitalis dunia yang dicetuskan oleh Wallerstein dan pengikutnya pada dasarnya mencita-citakan suatu tata ekonomi dunia yang berkeadilan ekonomi dan politik, atau dunia yang demokratis dan egaliter. Untuk mencapai hal itu ke sana ada beberapa hal yang dapat diupayakan yaitu;

- Tumbuhnya gerakan sosial atau gerakan populis berskala global. Asumsi ini berangkat dari analisisnya bahwa tidak mungkin untuk mengembangkan suatu dunia yang adil dan demokratis jika strategi yang ditempuh oleh masing-masing negara adalah dengan melakukan pembangunan dan pertumbuhan nasional yang dilakukan oleh masing-masing negara. Sebab metode pembangunan dan pertumbuhan suatu Negara yang terjadi saat ini selalu dibayar dengan keringat dan penderitaan negara lain bahkan tersingkirnya negara lain. Sehingga model kompetisi seperti ini harus diselesaikan oleh perjuangan kelas berskala global dan bukan lagi berskala nasional.
- Mengarahkan energy gerakan pada sumber surplus ekonomi, penyedotan surplus ekonomi global dengan cara mengurangi tingkat laba dan secara global memerhatikan persoalan pemerataan.

Daftar Pustaka

Arifin, Arifin (et.al), *IMF dan stabilitas Keuangan Internasional*, Jakarta: PT Elex Media Computindo, 2004

Joon, Ha Chang and Grabel, Ilene, *Membongkar mitos neolib; Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan*, Yogyakarta: Insist Press, 2008,

Khor, Martin, *Memperdagangkan Kedaulatan: Free Trade Agreement dan Nasib Bangsa*, Yogyakarta: Insist Press, 2010

Fakih, Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Insist Press, 2008

Fakih, Mansour, *Bebas Dari Neoliberalisme*, Yogyakarta: Insist Press, 2010

Ralston, John, Saul, *Runtuhnya Globalisme dan Penemuan Kembali Dunia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Laporan/Jurnal

Laporan UNDP tahun 2001 "Deepening Fragmancy in a Fragmanted World"

Laporan UNDP tahun 2002 " Making a New Technologies Work for a Human Develepment"